

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah merupakan suatu bentuk perwujudan dari demokrasi langsung dalam memilih kepala daerah. Dalam hal ini rakyat diberikan secara luas untuk menentukan sendiri atau memilih kepala daerah sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan harus ada dalam sistem demokrasi saat ini, karena partai politik memainkan peran penting dan menjamin adanya partisipasi politik sekaligus persaingan politik.

Setiap partai akan mengambil keputusan, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ini menunjukkan eksistensi partai politik yang merupakan bagian dari demokrasi. Jauh hari sebelum tahapan (Pemilukada), partai politik membuka penjangkaran calon, baik dari internal partai atau dari luar partai untuk calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota¹.

Artinya jauh sebelum tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) partai politik akan membuka tahapan penjangkaran terhadap calon-calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari luar maupun dari internal partai politik.

Dalam pemilihan umum kepala daerah melibatkan rakyat suatu daerah, untuk menentukan pemimpinnya lima tahun ke depan. Proses ini layak mendapatkan dukungan semua pihak terutama warga masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan sesungguhnya. Sebagai negara masih belajar demokrasi, seluruh rakyat Indonesia mesti menghargai seluruh proses telah dilakukan. Hanya saja diperlukan perbaikan kualitas dalam

¹ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

setiap pelaksanaannya, sehingga demokrasi akan tetap terjaga di Indonesia².

Menjelang Pemilihan umum kepala daerah, selalu terdapat proses dilakukan oleh partai politik dalam menentukan bakal calon akan diusung sebagai kandidat kepala daerah. Partai bisa mengajukan kandidat dari partai sendiri, atau partai mengajukan kandidat dari luar partainya, semua merupakan perhitungan politik dari masing-masing partai. Semua kegiatan diatas merupakan bagian dari rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik, dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah, terdapat proses seleksi kandidat.

Berangkat dari asumsi bahwa sebuah kedaulatan ada ditangan rakyat, dan salah satu syarat terwujudnya sebuah demokrasi adalah partai politik berfungsi maksimal dan efektif sebagai wadah aspirasi politik masyarakat, dan sebagai media untuk melakukan (tawar-menawar) *Bergaining* kebijakan-kebijakan negara. Demi terwujudnya demokrasi dan tersalurkannya aspirasi politik, jauh lebih penting meningkatkan kinerja dan efektivitas fungsi partai politik, dan jelas tidak bisa dilepaskan dari terdirinya partai politik sebagai sebuah kebutuhan dari masyarakat³.

Peran partai politik menjadi wadah aspirasi untuk masyarakat artinya partai politik harus maksimal dan efektif dalam mendengar aspirasi dari masyarakat agar terwujudnya sebuah demokrasi yang baik.

Seringkali memudarnya ideologi dalam konstelasi politik pasca reformasi, partai politik juga terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan transaksional, sehingga menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi. Semua partai dalam pemilihan umum akhirnya cenderung ke “tengah” atau lebih moderat dan berebut ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Fenomena ini akhirnya juga mendorong partai politik berebut suara

²Teguh Anggoro, Tina Cahya Mulyatin, Triono, “Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah Tasikmalaya Tahun 2017”, JIPP : Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol 06 No 01 Hal: 15 – 35 diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

³ Khoirudin, Partai Politik dan Angenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2014, hlm 8.

dengan menawarkan pertimbangan rasional bersifat jangka pendek dalam kampanye⁴.

Partai politik saat ini terjebak dalam situasi politik yang cenderung pragmatis dan transaksional, bisa dikatakan semua partai pada pemilihan umum akhirnya memilih untuk mengarah ke tengah atau lebih moderat, akhirnya fenomena ini menjadikan partai menawarkan pertimbangan rasional bersifat jangka pendek.

Memahami partai politik memberikan keuntungan terutama berkaitan dengan posisi partai politik. Landasan teoritik mengenai spesies partai politik sebagaimana dikemukakan oleh Gunther dan Diamond, memungkinkan untuk menemukan tipologi baru partai politik yang sebelumnya tidak terwakili oleh tipologi lama. Pemilihan umum menjadi arena paling utama dalam kontestasi politik yang menentukan tumbuh kembangnya partai politik. Hal ini mempengaruhi pergerakan orientasi partai politik sehingga tampak aktivitas partai politik hanya terjadi pada masa-masa menjelang pemilu saja. Partai dengan aktivitas untuk menjadikan pemilihan umum sebagai satu-satunya sasaran penting terwakili oleh tipe partai elektoralis. Dalam rumpun partai elektoralis, terdapat tiga tipe yakni partai *catch-all* dengan karakteristik utama ketidakjelasan ideologi dan platform dengan tingkat organisasi yang tidak mengakar. Kemudian, tipe *programmatic* dan menitikberatkan pada aktivitas program-program dibawa oleh kandidatnya serta tipe *personalistic* bertumpu pada patronase kuat dengan adanya pemimpin yang kharismatik⁵.

Pemilihan umum menjadi arena kontestasi bagi partai politik, dan hal itu dapat mempengaruhi aktivitas partai politik, yang mana partai akan mulai bergerak menjelang pemilu saja. Dan beberapa tipe partai politik seperti partai *catch-all* yaitu ketidakjelasan ideologi dan platform dengan tingkat organisasi tidak mengakar jelas partai tipe ini hanya fokus pada pemilu saja.

⁴ M. Faisal Aminuddin, *Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, (Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang: Vol. 1 No. 1, Agustus 2015) hlm. 40.

⁵ *Ibid*, hlm. 44

Dari tiga tipe partai turunan partai elektoralis diatas, polarisasi kepartaian Indonesia mempunyai tipe baru, yakni *match-all party* ini bisa diidentifikasi sebagai kecenderungan partai untuk memadukan semua unsur pencapaiannya. Kehadiran spesies *match-all party*, di Indonesia cenderung terjadi pada partai-partai politik baru, bisa diidentifikasi dengan beberapa indikator yaitu ketiadaan basis massa atau modal sosial yang kuat sebelumnya, ketergantungan terhadap eksistensi figur dan program, serta pemanfaatan berbagai potensi untuk memperoleh keuntungan baik pada dimensi citra maupun material. Partai yang masuk kategori *match-all* mempunyai ciri utama terletak pada tiadanya pembatasan ideologi, platform dan strategi untuk mengimplementasikan program-programnya⁶.

Karakteristik partai politik dalam kandidasi bahwa orientasi partai ketika menampilkan siapa yang menjadi calonnya dikarakteristikan pada tiga komponen yaitu elektabilitas (tingkat keterpilihan calon), popularitas (tingkat dikenalnya calon) dan akseptabilitas (tingkat diterimanya calon). Hal ini menjadi penting dalam konteks elektoralis karena orientasi partai yaitu hanya kepada menang atau kalah dalam pemilihan umum. Akibatnya terjadi hubungan kandidat dengan partai dalam konteks pertukaran ekonomi politik dimana berpengaruh terhadap dicalonkan atau tidaknya kandidat karena sifat partai yang elektoralis.

Pembahasan dalam penelitian ini akan diawali dengan pembangun polarisasi salah satu politik yaitu Partai Amanat Nasional di Provinsi Jambi. Kisah ini berawal dari lahirnya seorang Zulkifli Nurdin sang putera saudagar dari Muara Sabak, lahir pada tanggal 12 Juli 1948 di Muara Sabak saat agresi militer Belanda tengah terjadi.

Pada tahun 1996 Zulkifli Nurdin memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dengan bergabung di Partai Golongan Karya dan langsung diberi jabatan strategis. Zulkifli langsung dinobatkan menjadi Bendahara Partai Golongan Karya. Pada tahun 1998 saat reformasi terjadi, peta politik dan ekonomi berubah drastis di Provinsi Jambi. Zulkifli Nurdin

⁶ *Ibid*, hlm. 45

memilih pindah ke Partai Amanat Nasional. Sejak bergabung di Partai Amanat Nasional, sama seperti di Partai Golongan Karya, Zulkifli langsung diberi jabatan strategis, ditunjuk sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional Kota Jambi tahun 1998 sampai tahun 2001 dan selanjutnya, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional tahun 2001 sampai tahun 2004. Kemudian Zulkifli memilih langkah nekat untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Jambi dan kenekatannya itu berbuah hasil yang positif baginya. Zulkifli dan nama-nama seperti Hasip Kalimudin Syam dan Ramlie Jalil yang lebih mapan dan matang dalam pengalamannya berpolitik di Jambi sebagai saingannya, Zulkifli berhasil menjadi pemenang. Pada tahun 1999 Zulkifli Nurdin dilantik menjadi Gubernur Jambi⁷.

Artinya Zulkifli Nurdin dari awal bergabung ke Partai Amanat Nasional sudah diberi jabatan strategis yaitu ditunjuk sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional Kota Jambi dan selanjutnya beliau diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi kemudian pada tahun 1999 beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur dan dilantik menjadi Gubernur Jambi.

Jika melihat pilkada serentak 2015 di Jambi, baik ditingkat Provinsi dan lima Kabupaten/Kota, tidak ada satupun partai yang bisa mengukung calonnya sendiri karena terhambat (ambang batas perolehan suara) *parliamentary threshold* menuntut 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu artinya partai yang ada harus berkoalisi untuk memenuhi syarat minimal pencalonan. Partai politik mengandalkan jasa survei sehingga hanya calon dengan popularitas dan elektabilitas tinggi saja yang menjadi patokan partai dalam menentukan pasangan calon⁸.

⁷ Ketek, Naik. (2018). Zulkifli Nurdin, Zumi Zola dan politik dinasti di Jambi. Kumparan. Diakses dari <http://www.kumparan.com>. Pada tanggal 02 Juni 2021

⁸Mochammad Farisi, "Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Instrumen Sirkulasi Elit Politik Lokal: Studi di Provinsi Jambi Tahun 2015".(Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Vol. 2 No. 2, Juli 2016) hlm. 235

Tabel 1.1

Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2019

No.	Partai Politik	Perolehan Kursi
1	PDIP	9
2	Gerindra	7
3	Golkar	7
4	Demokrat	7
5	PAN	7
6	PKB	5
7	PKS	5
8	PPP	3
9	Nasdem	2
10	Hanura	2
11	Berkarya	1
Jumlah Kursi		55

Sumber: Gatra

Berdasarkan pada tabel 1.1 PDIP memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah 9 kursi, disusul oleh GERINDRA, GOLKAR, PAN, dan DEMOKRAT masing-masing mendapatkan 7 kursi, PKB dan PKS mendapatkan 5 kursi, sisa kursi diperoleh oleh PPP, NASDEM, HANURA, dan BEKARYA, dari jumlah kursi tersebut yang dimiliki oleh masing-masing partai dapat disimpulkan adanya persaingan yang ketat antara partai PAN dan tiga partai lainnya sama-sama memperoleh 7 kursi.

Dalam kontestasi pilkada partai politik kembali bersiap menetapkan calon untuk menjadi kader terbaik nantinya dapat meraih kemenangan. Dibalik ditetapkannya kandidat tentu mengalami dinamika seperti munculnya tarik ulur dukungan dari partai politik. Salah satu pasangan bakal calon terlibat

dalam dinamika tarik ulur dukungan pada pilkada Jambi tahun 2020 adalah bakal pasangan calon Gubernur Al-Haris dengan *tagline* “Mantap” didukung oleh Partai Amanat Nasional, Al-Haris dulu merupakan kader Partai Golongan Karya lalu pindah ke Partai Amanat Nasional. Padahal disatu sisi Partai Amanat Nasional memiliki kader murni yaitu Ratu Munawaroh istri Zulkifli Nurdin Gubernur Provinsi Jambi 2 periode⁹.

Pada kontestasi politik pemilihan Gubernur 2020 partai Partai Amanat Nasional resmi mengusung Al Haris sebagai calon Gubernur, hal ini tentu mengalami dinamika seperti tarik ulur dukungan oleh partai politik. Karena Al Haris sebelumnya adalah kader partai dari Golongan Karya, yang mana pada sisi lain Partai Amanat Nasional memiliki kader murni yaitu Ratu Munawwaroh sehingga memperlama proses pemilihan calon atau pengusungan dari Partai Amanat Nasional.

Kemunculan Ratu Munawaroh sebetulnya mulai terbaca ketika ramai pengisian kekosongan Wakil Gubernur Jambi awal tahun 2019 lalu. Nama Ratu sempat muncul sebagai salah satu calon Wakil Gubernur dari Partai Amanat Nasional. Ratu Munawaroh telah bertemu Zulkifli Hasan, termasuk pentolan Partai Amanat Nasional seperti Hatta Rajasa dan Sutrisno Bachir. Jalan Ratu kian terbuka ketika Bakri secara mengejutkan menyatakan undur diri dari kontestasi. Akan tetapi, euforia Ratu dan trah Nurdin hanya sebentar. Mekanisme penjaringan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di internal Partai Amanat Nasional, tiba-tiba dibuat terbuka, sehingga siapa saja punya peluang yang sama untuk menggenggam tiket Partai Amanat Nasional. Apalagi sejak Bakri melempar gelagat tak antusias menyambut Ratu di internal Partai Amanat Nasional, Bakri terus mempertegas bahwa siapa saja berpeluang diusung, tidak ada prioritas apalagi keistimewaan bagi Ratu, istri pendiri Partai Amanat Nasional Jambi itu. Namun tak diduga hambatan Ratu pada pemilihan Gubernur 2020 ini justru datang dari Bakri, orang yang pernah dibesarkan suaminya. Terlebih ketika Bakri lagi-lagi melempar sinyal membuka peluang kepada Walikota Jambi Syarif Fasha dan Bupati Merangin Al Haris. Kembali ke Partai Amanat Nasional, dari data empirik itu menunjukkan bahwa Bakri hampir pasti tidak mendukung langkah Ratu pada pemilihan Gubernur Jambi. Tiket Partai Amanat Nasional yang

⁹ TribunJambi.com”Siapa Sebenarnya Ratu Munawaroh? Cek Jejak Karier Ibu Zumi Zola Maju Pilgub Jambi 2020” <https://jambi.tribunnews.com/2020/06/16> diakses pada tanggal 11 April 2021

semula diperkirakan dikantongi Ratu, boleh jadi memang akan jatuh ke tangan Al Haris atau Fasha¹⁰.

Terbukanya proses penjaringan kandidat oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional menjadi hambatan bagi Ratu Munawaroh untuk menggenggam tiket dari Partai Amanat Nasional, sehingga proses itu membuat peluang bagi calon Gubernur yang lain seperti Al Haris dan Sharif Fasha untuk merebut tiket dari Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika terkait prefensi politik masyarakat jelang perhelatan kontestasi politik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada 9 Desember 2020. Elektabilitas Syarif Fasha masih menempati posisi teratas dibanding sejumlah tokoh lainnya. Untuk elektabilitas calon Gubernur, Syarif Fasha 24,8 persen, disusul Cek Endra 20,6 persen, Al Haris 16,8 persen dan terakhir Fachrori Umar 10,9 persen. Dan untuk elektabilitas Wakil Gubernur, diposisi pertama dilihat dari hasil survei Ratu Munawaroh memiliki daya dorong yang cukup kuat dibanding nama-nama lain, Ratu munawaroh 15,6 persen, disusul oleh Abdullah Sani 12,5 persen, Asafri Jaya Bakri 10,2 persen dan terakhir Safrial dibawah 10 persen¹¹.

Namun mendekati Pemilihan Kepala Daerah ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi mengatakan rekomendasi Partai Amanat Nasional akan berlabuh diantara tiga nama yaitu Cek Endra, Fachrori Umar dan Al-Haris, ketiga nama-nama tersebut sangat digaung-gaungkan akan tiket dari Partai Amanat Nasional.

Sebenarnya jauh sebelum itu, Ratu Munawaroh sempat mengingatkan Partai Amanat Nasional akan sejarah mendiang suaminya yang jatuh-bangun membesarkan Partai Amanat Nasional di Jambi. Kenangan itu diungkit oleh Ratu

¹⁰ Dedek Kusnadi, "PAN Jambi Bermanuver, Bakri Hadang Ratu?", diakses dari <https://jambilink.com/pan-jambi-bermanuver-bakri-hadang-ratu/> Pada tanggal 03 Juni 2021.

¹¹ MetroJambi.com "Charta Politika Rilis Hasil Survei Terbaru, Elektabilitas Fasha Masih Tertinggi" diakses dari <https://www.metrojambi.com/read/2020/08/25/56084/charta-politika-rilis-hasil-survei-terbaru-elektabilitas-fasha-masih-tertinggi/> pada tanggal 18 November 2021/

saat mengembalikan berkas pendaftaran di partai pada 19 Juni 2020. Ratu juga menyatakan keinginannya supaya Partai Amanat Nasional dapat mengusunginya pada pemilihan Gubernur Jambi dengan mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Gubernur. Namun sesuai mekanisme yang sudah dijalankan, ini bukan sifatnya pribadi tetapi ini mekanisme yang sedang berjalan, ditengah jalan ketika masih proses Ratu Munawaroh sudah mengambil keputusan untuk pindah ke salah satu partai. Artinya kalau sudah pindah ke salah satu partai maka Partai Amanat Nasional tidak bisa berharap kepada Ratu Munawaroh. Setelah jalani proses, akhirnya proses itu jatuh pada pasangan Al Haris dan Abdullah Sani.

Alasannya terpilihnya kandidat tentu dilatarbelakangi oleh partai politik melihat seberapa dikenalnya (popularitas), diterima (akseptabilitas) dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) seorang calon dan potensi yang dimiliki calon tersebut, karena tidak dapat dipungkiri partai politik akan memilih calon berpotensi meraih kemenangan dalam pemilihan. Melihat konteks pemilihan kepala daerah, semakin besar akumulasi modal dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan diperoleh dari partai politik¹².

Persoalan tersebut, menunjukkan praktek politisi pada partai politik cenderung pragmatis sebagai strategi memenangi kontestasi pada pemilihan kepala daerah. Pragmatis politik bukan lagi bertujuan menyelesaikan sesuatu, yakni mencari kepemimpinan tidak serba pragmatis, tetapi piawai dalam tataran konsep dan piawai dalam pelaksanaan, melainkan berbentuk kapitalisasi politik, yaitu pengorganisasian segala sumber daya untuk kemenangan pada pemilu.

¹² Tasha Lodya, "Modal Kandidat dalam Kandidasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 Studi Pada Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi Pada Partai Demokrat dan Golkar" Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Jatinangor, Tahun 2019 hlm.2 Diakses pada tanggal 24 Desember 2020 Pukul 19:55

Bagi partai politik, kondisi tersebut memberi struktur kesempatan politik terciptanya kondisi politik cenderung pragmatis, salah satunya ditunjukkan dengan perubahan sikap partai dalam berbagai momen politik. Dalam kondisi demikian, partai politik disatu sisi memainkan peran dalam mendukung dan menghambat program pemerintah, disatu sisi juga dituntut beradaptasi dengan tawar-menawar politik yang memberinya keuntungan bagi partai politik¹³.

Pragmatis tampil dalam bentuk usaha partai politik mencari figur populer paling prospektif untuk kemenangan. Jika figur prospektif tersebut diusung partai lain, maka terjadilah koalisi pragmatis. Pada titik ini, jarak ideologi antara partai tidak masalah. Lebih penting dari pada itu adalah kalkulasi kemenangan kandidat dan untuk memenuhi syarat administrasi dalam pemilihan kepala daerah. Adapun kader partai tidak populer pun harus tersingkir, atau dengan bahasa lain harus mengalah. Selanjutnya, uang menjadi pelicin untuk mengegolkan kandidasi, menjalankan mesin partai, dan merebut simpati masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu dari Revol Afkar yang berjudul “Dinamika Proses Kandidasi Calon Gubernur PKB Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013” dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dukungan. Pertama, proses penentuan Khofifah sebagai calon Gubernur dianggap sepihak karena Dewan Syuro merasa tidak dilibatkan oleh Dewan Tanfidz dalam proses tersebut. Kedua, pragmatis politik Dewan Syuro dimana Elit Dewan Syuro yang mendukung pasangan Karsa dengan berdasarkan hasil survei pra pemilihan Gubernur. Sehingga mengindikasikan terdapat kepentingan politik yang berusaha dicapai oleh Dewan Syuro melalui politik transaksional. Ketiga adalah lunturnya kharisma Elit Dewan Syuro sebagai struktural tertinggi Elit partai yang membuat pandangannya tidak lagi berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai¹⁴.

¹³ M. Faisal Aminuddin, (2015) “*Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009*”, Jurnal Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Malang: Vol. 1 No 2.

¹⁴ Revol Afkar, “DINAMIKA PROSES KANDIDASI CALON GUBERNUR PKB PADA PILGUB JAWA TIMUR 2013”, Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014 di akses pada tanggal 07 Juni 2021

Proses kandidasi yang ada pada penelitian terdahulu Revol Afkar, prosesnya begitu pragmatis terlihat dari tidak dilibatkannya seluruh Elit Dewan Syuro dan terjadi perpisahan dua kelompok Dewan Syuro PKB Jawa Timur tahun 2013.

Penelitian selanjutnya dari Riko Kristian dengan judul “Studi Kandidasi Pasangan Calon Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Tidung Tahun 2020” Hasil dari Penelitian ini menunjukkan terbentuknya sebuah formasi elite lokal dalam kandidasi dilatarbelakangi oleh kemampuan ekonomi kandidat calon yang ditopang dengan identitas ketokohan dari etnis dan agama di Tana Tidung kemudian pola kontestasi elite dalam Pilkada Tana Tidung masih dipengaruhi oleh karakteristik pemilih yang notabene bersifat Primordialisme¹⁵.

Proses kandidasi pada penelitian terdahulu Riko Kristian, kelompok elit lokal membentuk sebuah formasi dalam kandidasinya dilatarbelakangi dengan kemampuan ekonomi kandidat dan calon Kepala Daerah Tana Tidung dipengaruhi dengan karakteristik yang bersifat Primordialisme.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Keputusan Politik Partai Amanat Nasional Dalam Mengusung Al Haris – Abdullah Sani Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka terdapat beberapa rumusan masalah untuk penulis melakukan penelitian. Adapun rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Riko Kristian, “Studi Kandidasi Pasangan Calon Pada Pilkada Tana Tidung Tahun 2020”, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi pembangunan Masyarakat, Yogyakarta, Tahun 2020

- a. Bagaimana proses kandidasi Partai Amanat Nasional dalam menentukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020?
- b. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan penentuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisa proses kandidasi yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam mengambil keputusan mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui keputusan penentuan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi Tahun 2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

- a. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis fenomena mengenai keputusan partai politik dalam menentukan kandidat maupun terkait pemilihan kepala daerah.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk dapat memperkaya informasi mengenai modal dalam kandidasi pada pemilihan kepala daerah. Kemudian, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi partai politik dalam melihat modal yang dimiliki calon kandidat serta rujukan bagi calon kandidat yang ingin maju dalam kontestasi politik.

1.5. Landasan Teori

1.5.1 Teori Kandidasi Partai Politik

Partai politik menurut Carl J. Friedrich didefinisikan sebagai sekelompok manusia terorganisir secara stabil yang bertujuan merebut ataupun mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil dan materil¹⁶.

Definisi lain juga diungkapkan oleh Sigmund Neuman yang mendefinisikan bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik dan berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan ataupun golongan lainnya dengan pandangan berbeda¹⁷.

Secara umum partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Fungsi utama dari partai politik ini sendiri adalah untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon partai terpilih selanjutnya adalah melakukan kampanye, setelah kampanye

¹⁶Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 148.

¹⁷Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 404.

dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan partai adalah melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.

Peran partai politik dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah adalah menghadirkan calon pemimpin daerah yang dapat dipercaya. Dalam proses elektoral, partai dituntut bukan hanya mempersiapkan kader-kader terbaik untuk diuji keterpilihannya dihadapan publik, namun juga melakukan tahap-tahap kandidasi sesuai dengan peraturan yang ada dengan basis hukum dan etika publik yang berlaku.

Partai memiliki kedudukan yang utama dan pertama dalam proses pencalonan pada pemilihan kepala daerah karena partai menjadi saluran untuk menominasikan individu yang dianggap sejalan dengan gagasan maupun ideologi politiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik tentu memiliki kewajiban untuk memastikan calon terbaik yang diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk jadi pilihan masyarakat. Sebab, mengusung calon yang tidak layak sama halnya dengan melakukan kebohongan publik¹⁸.

Perubahan paradigmatik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah awalnya melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian beralih secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peran partai politik sebagai arena Pemilihan Kepala Daerah. Dalam artian, partai politik menjadi satu-satunya institusi dengan keistimewaan dalam hal pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hanya melalui partai politik seorang dapat menjadi kandidat dan berkompetisi dalam pemilihan. Meskipun pada akhirnya terdapat

¹⁸ Iqbal fajar Dwiranda, *Kandidat Problematika dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Pragmatisme Partai Politik*, (Jurnal Transformative Universitas Brawijaya, Malang: Vol.6 No. 2, 2020), hlm. 241

revisi bahwa calon kepala daerah dimungkinkan maju tidak hanya melalui jalur partai melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya partai politik terbukti masih begitu dominan dalam proses pencalonan kandidat. Melalui hal itu, partai politik menjadi institusi yang diharapkan mampu untuk memastikan kemunculan calon-calon dengan integritas yang tinggi.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, bahwa kepala daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota banyak berasal dari kalangan artis, atlet atau orang-orang yang bukan merupakan kader partai. Hal ini sebenarnya untuk merespon bahwa partai politik sampai saat ini masih sangat pragmatis dalam menempatkan anggotanya untuk menduduki posisi-posisi politik baik dilembaga legislatif maupun sebagai pejabat publik¹⁹.

Persoalan utama kemudian mengarah tentang bagaimana proses kandidasi oleh partai dilakukan secara pragmatis. Terdapat beberapa penjelasan mengenai ini, namun salah satunya adalah kegagalan kaderisasi yang dilakukan oleh partai yang cenderung membuat partai memilih jalan pintas dengan mencalonkan kandidat dengan potensi kemenangan tinggi walaupun dengan mengabaikan rekam jejaknya. Hal ini tidak bisa dilepaskan fakta bahwa tahap kandidasi pemilihan kepala daerah di Indonesia memang masih cukup problematis.

Mada Sukmajati menjelaskan bahwa untuk mekanisme kandidasi, tahapan penetapan calon dalam pemilihan kepala daerah umumnya masih bersifat tertutup. Pada tahapan tersebut anggota partai dan masyarakat umum tidak dapat mengikuti proses yang diselenggarakan. Hampir sama dengan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif, tahapan penetapan calon

¹⁹ Muryanto Amin, *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik*, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 90.

untuk pemilihan kepala daerah seolah menjadi ruang yang gelap. Pada konteks itulah praktek-praktek politik transaksional biasanya bekerja antara kandidat dan selektorat. Pada tahapan itu pula siapa mendapat apa kemudian dinegosiasikan²⁰.

Berdasarkan beberapa kasus, bahkan ketua umum partai politik dan pengurus partai politik ditingkat pusat juga terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Tidak jarang, keputusan-keputusan kontroversial dari pengurus partai politik ditingkat pusat kemudian dibuat. Selain itu, proses kandidasi partai hanya mempertimbangkan potensi tinggi dan menguntungkan juga berpengaruh dalam hal ini. Bagi partai, mereka yang memiliki sumber daya politik seperti kekuasaan, dana atau jaringan dilihat sebagai potensi keunggulan tersendiri.

Secara sederhana terdapat empat hal penting dalam menunjukkan partai politik dalam menentukan calon yang diusung. Pertama terkait siapa kandidat dapat dinominasikan. Kedua, siapa yang akan melakukan seleksi. Ketiga, dimana kandidat tersebut diseleksi dan keempat, bagaimana selanjutnya kandidat diputuskan. Apabila proses ini berjalan dengan benar sesuai prosedur maka akan diperoleh kandidat yang berkualitas dan kompeten dari partai politik²¹.

Penentuan calon kandidat yang berkualitas dan kompeten dari partai politik, partai harus melewati beberapa tahapan pertama, siapa kandidat dapat dinominasikan, kedua, siapa yang melakukan seleksi, ketiga, dimana kandidat diseleksi, dan keempat, bagaimana kandidat diputuskan, beberapa tahapan itulah yang menjadi hal penting dalam memilih kandidat yang berkualitas untuk partai.

Realitas politik kontemporer menunjukkan dengan jelas bahwa kehadiran partai politik di Indonesia tidak otomatis berkontribusi positif terhadap sistem politik yang demokratis pula. Robert Michels, menyatakan bahwa organisasi politik yang berskala besar seperti partai politik, cenderung

²⁰*Ibid*, hlm. 243

²¹Amir Syamsuadi, *Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015*, (Jurnal of Governance Universitas Abdurrahman, Pekanbaru: Vol.3 No. 2, 2018), hlm. 138

dikelola secara oligarkis lebih melayani kepentingan sendiri dari kepentingan organisasi. Keberadaan dan perkembangan partai politik pasca reformasi belum menunjukkan eksistensi sebagai sebuah institusi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat pemilihnya. Partai politik hingga kini belum memperlihatkan akuntabilitas, transparansi dan demokrasi baik kepada konstituen maupun anggota atau kadernya²².

Partai politik di Indonesia saat ini lebih memilih kepentingan politik sendiri dibanding kepentingan organisasi dan partai cenderung tidak transparan serta tidak demokrasi terhadap kader maupun anggota partai nya sendiri, hal itu dikarenakan partai dikelola secara oligarkis.

Menurut Sulaeman, partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan Partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai saja. Keputusan tertinggi biasanya berada pada seseorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal partai dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah. Selain itu, jika digunakan parameter “personalisasi” ini untuk menilai kondisi partai-partai politik ditanah air saat ini, tentu banyak sekali partai politik yang belum melembaga secara *depersonalized*. Hasilnya, partai politik tidak benar-benar menjangkau aspirasi dari bawah tentang calon yang diharapkan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis sekelompok elit saja²³.

Meskipun sebagian partai politik memiliki prosedur seleksi calon anggota, namun justru pimpinan partai politik sendiri melanggar prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama, sementara itu problem lain terkait rekrutmen calon pejabat publik adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat.

²² Muhammad Ruslan, *Demokrasi dan Transparansi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Rekrutmen Caleg Pada Pemilu 2019*, (Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya: Vol.2 No. 2, 2020), hlm. 129.

²³ *Ibid*, hlm. 130.

1.5.2 Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut Robert Jervis “Para pengambil keputusan cenderung memiliki persepsi yang bersifat egosentris dalam mengintepretasikan keputusan-keputusan mereka sebagai respon dari kondisi-kondisi objektif, dalam hal ini kondisi lingkungan eksternal mereka dalam pembuatan keputusan akan bertindak dengan mempertimbangkan keputusannya, termasuk sistem politik nasional”²⁴.

Partai politik lebih mengacu situasi kondisi politik domestik salah satunya adalah peran partai politik yang mempengaruhi diambilnya kebijakan karena dalam sistem politik yang memungkinkan banyak, menyoroti peran partai politik dalam proses pengambilan keputusan, apakah partai-partai ini berpartisipasi dalam pemerintahan dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Partai politik berusaha mencapai tujuan mereka sendiri dalam persaingan satu sama lain, dengan tujuan untuk memenangkan jabatan, jadi mereka mungkin mendukung isu-isu bukan demi masalah itu sendiri, tapi untuk memenangkan suara semaksimal mungkin.

1.5.3 Teori Politik Kekuasaan

Menurut Richard L. Daft mendefinisikan politik kekuasaan sebagai “kegiatan yang melibatkan kegiatan memperoleh, mengembangkan dan menggunakan kekuasaan (power) dan sumber daya lainnya guna mempengaruhi pihak lain serta menambah hasil yang diharapkan terdapat ketidakmenentuan ataupun ketidaksetujuan seputar pilihan-pilihan yang tersedia”²⁵.

Keputusan politik menggunakan kekuatan seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan atau memperoleh kekuasaan.

1.6 Kerangka Pikir

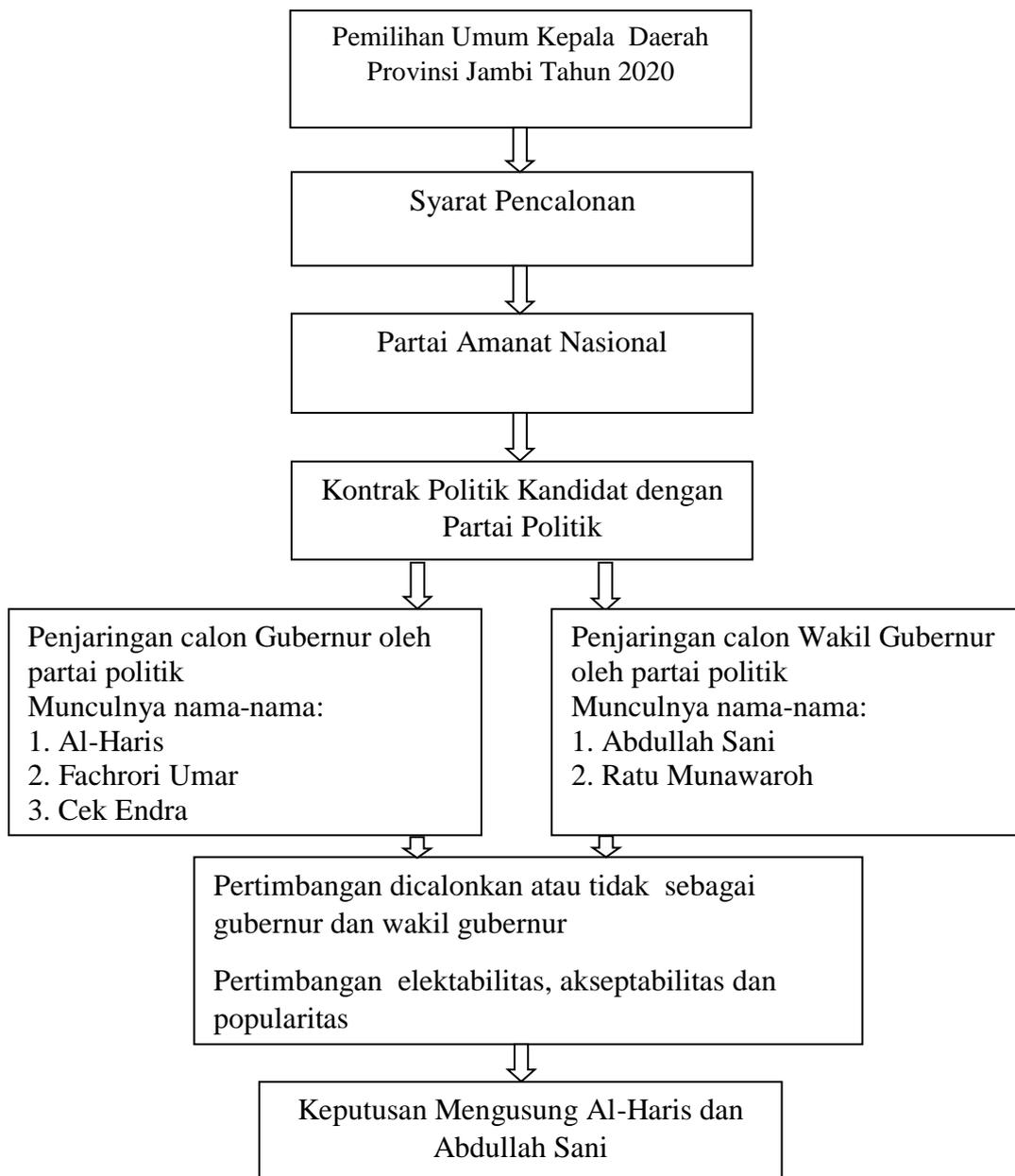
Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena

²⁴ *Ibid*, hlm. 131.

²⁵ *Ibid*, hlm. 132.

lebih mencakup tujuan dari peneliti itu sendiri. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji, dan menganalisis keputusan politik Partai Amanat Nasional dalam mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 2020.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dilihat bahwa keputusan mengusung Al-Haris dan Abdullah Sani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020 tidak terjadi begitu saja melainkan melalui banyak dinamika mulai dari sifat partai politik elektoralis dimana partai orientasinya hanya menang atau kalah. Kemudian syarat calon yang ditetapkan partai, disini partai melihat elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas calon sehingga kemudian antara calon dan partai terjadi kontrak politik biasanya ditahap ini sering terjadi pertukaran ekonomi politik. Tahapan terakhir penjaringan oleh partai politik, tentu calon yang paling menguntungkan dan memiliki peluang besar untuk menang yang akan dipilih oleh partai politik sebagai kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu bersifat logis²⁶.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Pendekatan kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan dari pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang ada. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Penerbit Afabeta, 2011), hlm. 2

situasi tertentu, pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan²⁷.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara mendalam, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi di lapangan. Selain itu juga penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis masalah-masalah aktual dan kemudian data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan dianalisis.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi berada di Jl. Lintas Sumatra 9HJ7+R32, Kenali Besar, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. dalam Mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Pertimbangan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis Keputusan politik Partai Amanat Nasional sebagai salah satu pengusung Al haris – Abdullah Sani dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Maka dimensi dari penelitian ini

²⁷Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.(Alfabeta: Bandung, April 2017), hlm. 39

meliputi mekanisme pertimbangan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi keputusan politik yang dilakukan Partai Amanat Nasional dalam mengusung calon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁸. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara, dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal. dan data pendukung yang diperoleh penelitian dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian.

²⁸Sugiyono, *Op.Cit.* hlm.225

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif²⁹.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan/ Parpol	Alasan
1	H. A Bakri HM, S.E	Ketua DPW PAN Provinsi Jambi	Mengetahui proses keputusan pengusungan Cagub dan Cawagub di DPW PAN Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi.
2	H. Madian Saswadi, SE, MM	Ketua Bapilu DPW PAN Provinsi Jambi	Mengetahui proses keputusan pengusungan Cagub dan Cawagub di DPW PAN Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi
3	Dr. H. Pahrudin HM,S.S., M.A.	Pengamat Politik	Mengetahui, mengamati Dinamika dan Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
4	Hasan Mabruri S.sos	Direktur Center Al haris dan Abdullah Sani/ Tim pemenangan.	Mengetahui, Proses Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur

Sumber: Data Olahan

²⁹*Ibid*, hlm. 48.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan metodologi penelitian Kualitatif dasar teori dan terapannya dalam penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci³⁰.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi dapat berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara:

a. Reduksi Data

³⁰Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret 2006), hlm. 70.

Proses dimana seorang peneliti melakukan pendataan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan data dengan sistematis sesuatu dengan yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan³¹.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagian hasil dari kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data (Triangulasi Data)

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data³².

Dalam Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode:

³¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), hlm. 123

³²*Ibid*, hlm. 100-101

- a. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
- b. Triangulasi dengan metode, ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian dalam menyusun skripsi ini, maka penulis mengelompokkan atau membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pikir, metode penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab yang berisikan deskripsi Partai Amanat Nasional ditingkat pusat dan Provinsi Jambi serta profil calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

BAB III : Bab yang berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB IV : Bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

